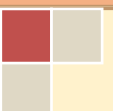




RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan nikmat-Nya penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjung balai merupakan instansi teknis di Kota Tanjungbalai yang menyelenggarakan urusan Pemerintah fungsi penunjang pengawasan sebagai upaya untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Tanjungbalai seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026. Sejalan dengan rencana pencapaian misi untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) untuk mencapai prestasi diberbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima.

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai

Akhirnya dengan segala kerendahan hati atas keterbatasan yang kami miliki, Atas tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai Tahun 2025 ini, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai yang turut membantu, dan semoga laporan ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas

pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai kepada masyarakat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tanjungbalai, Juli 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA TANJUNGBALAI**



MILFA, S.E
Pembina Tk.I
NIP.19680227 198903 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PP, PA dan PM Kota Tanjungbalai	20
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PP, PA dan PM Kota Tanjungbalai	20
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN	23
3.1. Tujuan	23
3.2. Sasaran	23
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
BAB V : PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan rencana kerja (Renja) SKPD merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah. Hal ini diterangkan di dalam Permendagri No. 86 tahun 2017. Disebutkan pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 3 bahwa “Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah”. Selanjutnya pada Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa rencana pembangunan daerah terdiri atas “RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah). Lebih rincinya lagi terkait ruang lingkup SKPD dalam merencanakan pembangunan daerah diatur pada pasal 11 ayat (4) bahwa “RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) terdiri atas Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah dan Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan Permendagri No. 86 tahun 2017 tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) sebagai SKPD yang turut andil dalam merencanakan pembangunan daerah guna peningkatan kualitas pelayanan publik pada urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana yang diatur pada Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai. Penyusunan Program/kegiatan pada renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Tanjungbalai disesuaikan dengan pencapaian visi, misi, sasaran, tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai yang sejalan dengan pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan Kota Tanjungbalai pada RPJMD.

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai adalah **“Terwujudnya Partisipasi Masyarakat, Berkeadilan Gender dan Perlindungan Anak Menuju Keluarga Sejahtera dan Harmonis”**. Visi ini sejalan dengan misi ke-7 Walikota Tanjungbalai yaitu Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga. Sedangkan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai adalah:

1. Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Mengembangkan sumber daya ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan dan pendayagunaan TTG, serta mengentaskan kemiskinan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif;
3. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan gender;
4. Meningkatkan kesejahteraan/ perlindungan perempuan dan anak dengan mewujudkan kebijakan yang responsif gender dan peduli anak untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan serta memenuhi hak tumbuh kembang dan melindungi anak dari tindak kekerasan.

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis

lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tanjungbalai yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai memuat rencana program kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Renja harus tercantum dalam Renstra yang selanjutnya menjadi dasar/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh masing-masing Kepala Sub Bagian pada Sekretariat, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan & Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak dan Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan & Kualitas Keluarga disesuaikan dengan kebutuhan riil yang ada agar kemudian usulan kegiatan tersebut dirangkum menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai dan disepakati kemudian diolah serta diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai untuk pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran Kota Tanjungbalai. Hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran tersebut untuk selanjutnya menjadi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai sebagai unsur pelaksana teknis telah melakukan berbagai upaya yang terencana dan terpadu untuk mendorong peran serta yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui program-program yang memberikan fasilitas dan motivasinya sehingga

mendayagunakan semua potensi yang dimiliki untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai merupakan upaya strategis yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta di bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan bidang yang cukup rawan karena secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan aspek sosial yang berkembang serta mempunyai korelasi dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu semua kebijakan strategis dan program serta SDM telah ditinjau dan disesuaikan kembali dan perlu dipertajam dan difokus ulang agar lebih mampu menjadi pedoman pelaksanaan dalam mengatasi permasalahan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbaai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
16. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019;
21. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
22. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungbalai;
23. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;

26. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai Tahun 2025 adalah sebagai landasan atau pedoman dalam melaksanakan tugas, pokok dan tata kerja yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Adapun yang menjadi tujuan dari disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai adalah sebagai pedoman atau landasan operasional guna melaksanakan berbagai program dan kegiatan, sehingga program dan kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja kegiatan. Terealisasinya target dalam indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dan pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai selama tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Tanjungbalai, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas P3A dan PM Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun 2023 yang telah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Surat Perintah Membayar (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan serta isu-isu penting berupa catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan SKPD.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berisikan uraian mengenai Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan cacatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari

penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kota Tanjungbalai.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai Tahun 2025 disusun berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat pada tahun 2025 dengan memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang di lingkungan pemerintah kota Tanjungbalai maupun dalam lingkup Nasional. Tidak hanya memperhatikan perkembangan isu-isu strategis saja, Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai tahun 2025 disusun dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan renja pada tahun sebelumnya. Evaluasi dilakukan pada ranah ketercapaian atau ketidaktercapaian target kinerja keluaran dengan anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan tersebut. Pada tahap evaluasi dilakukan analisis terkait ketercapaian/ketidaktercapaian target kinerja guna memperoleh informasi yang akurat untuk perbaikan perencanaan selanjutnya.

Pada tahun 2023 anggaran belanja langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai sebesar Rp. 3.106.015.908,- dengan 8 program yang meliputi 20 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Dengan alokasi anggaran tersebut, jumlah realisasi sebesar Rp 2.820.446.685 atau 90,80 % dari anggaran belanja langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai. Ketercapaian/ketidaktercapaian target kinerja keluaran akan dijelaskan secara rinci beserta analisis penyebab ketercapaian atau ketidak tercapaian di bawah ini :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan yaitu :

a. Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program Pemenuhan Hak Anak terdiri dari 2 indikator kinerja dan belum dapat memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan, yaitu :

1. Persentase Jumlah Sarana dan prasarana ramah anak yang ditargetkan sebesar adalah 80%, realisasi kinerja tercapai adalah 0 % karena tidak ada alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan sekolah ramah anak dan rumah ibadah, dan kami upayakan tahun 2024 ini agar di tampung anggarannya pada P APBD tahun 2024 dan tahun 2025 akan datang.
2. Jumlah DEKELA dan KELANA ditargetkan adalah 1 Kelurahan, realisasi kinerja tercapai adalah 0 % karena masih tahap pembinaan, upayaanya melakukan sosialisasi dan advokasi tentang pemahaman apa artinya DEKELA yaitu Desa Kelurahan Layak Anak dan KELANA artinya yaitu Kecamatan Layak Anak yang merupakan IKU pak Walikota Tanjungbalai.

b. Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan

Tidak ada kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan, semua kegiatan tercapai sesuai dengan target.

2. Realisasi Program/Kegiatan Yang telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

a. Program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota**, indikator kinerja ; Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi, dengan target kinerja sebesar 100 % telah terealisasi sesuai target.

2. **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**, indikator kinerja ; Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, dengan target kinerja sebesar 20 % telah terealisasi sesuai target.
 3. **Program Perlindungan Perempuan**, indikator kinerja ; Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan, dengan target kinerja sebesar 100 % telah terealisasi sesuai target.
 4. **Program Peningkatan Kualitas Keluarga**, indikator kinerja ; Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif, dengan target kinerja sebesar 100 % telah terealisasi sesuai target.
 5. **Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**, indikator kinerja ; Ketersediaan data terpilah gender, dengan target kinerja sebesar 100 % telah terealisasi sesuai target.
 6. **Program Perlindungan Khusus Anak**, indikator kinerja ; Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait, dengan target kinerja sebesar 100 % telah terealisasi sesuai target.
 7. **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**, indikator kinerja ; Persentase PKK aktif, dengan target kinerja sebesar 100 % telah terealisasi sesuai target.
- b. Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**
1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dengan target kinerja indikator ; Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi, sebesar 100 % telah terealisasi sesuai target dengan tersusunnya Renja Tahun 2024, Renja Perubahan Tahun 2023 dan LAKIP Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai. Hal ini terjadi dikarenakan sistem perencanaan dan pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai semakin baik.

2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, indikator kinerja ; Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah, telah terealisasi sesuai target yaitu 100 % dengan terlaksananya pemberian gaji dan tunjangan tahun 2023 kepada seluruh ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai dan tersusunnya dokumen Laporan Keuangan Tahun 2023.
3. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, indikator kinerja ; Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran telah terealisasi sesuai target yaitu 100 %.
4. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, , indikator kinerja ; Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, telah terealisasi 100 % sesuai target.
5. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, indikator kinerja ; Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, telah terealisasi sebesar 100 % dengan terpenuhinya kebutuhan surat menyurat, pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik, serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
6. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, indikator kinerja ; Persentase terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah telah terealisasi 100 % dengan terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional serta peralatan dan mesin kantor.
7. **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**, indikator kinerja ; Persentase OPD yang melaksanakan ARG telah terealisasi 100 % sesuai target.

- 8. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilingkup daerah kabupaten/kota**, indikator kinerja ; Persentase masyarakat yang mengikuti pendampingan telah terealisasi 100 % sesuai target.
 - 9. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota**, indikator kinerja ; Persentase kasus yang tertangani telah terealisasi 100 % sesuai target.
 - 10. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**, indikator kinerja Persentase lembaga penyedia layanan telah terealisasi 100 % sesuai target.
 - 11. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**, indikator kinerja Persentase keluarga yang mendapat pembinaan telah terealisasi 100 % sesuai target.
 - 12. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**, indikator kinerja Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki data gender dan anak telah terealisasi 100 % sesuai target.
 - 13. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**, indikator kinerja Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat telah terealisasi 100 % sesuai target.
- 3. Realisasi Program/ Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**
- Pencapaian kinerja keluaran pada tahun 2023 tidak ada yang melebihi target yang direncanakan. Realisasi yang sesuai target terpaku pada anggaran yang sudah

ditetapkan. Sebagian besar realisasi target kinerja keluaran kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan capaian 100 % sesuai dengan perencanaan.

4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Tidak adanya hambatan-hambatan yang berarti dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berimplikasi pada terpenuhinya target kinerja keluaran program/ kegiatan yang telah direncanakan. Disamping dari ketiadaan hambatan-hambatan yang berarti, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku selalu dijadikan sebagai prioritas, termasuk pada pelaksanaan layanan yang diselenggarakan taat pada perencanaan yang terdapat pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Manajemen dan pengawasan kerja baik di lingkungan internal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai maupun di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai sudah memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi. Dahulunya pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan secara tatap muka, namun perubahan yang sangat berarti terlihat pada tahun 2023. Pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang berfungsi sebagai media komunikasi dan informasi sangat membantu dalam hal manajemen dan pengawasan kerja oleh pimpinan. Dengan kehadiran aplikasi-aplikasi yang sangat memudahkan membuat batas ruang tidak menjadi kendala yang berarti dalam melakukan pembinaan ataupun pengawasan.

5. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra SKPD

Program renstra dijabarkan dari program-program RPJMD Kota Tanjungbalai yang secara umum bertujuan untuk Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kota Tanjungbalai. Program-program Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai. Jangkauan Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai kepada masyarakat khususnya kepada perempuan dan anak serta masyarakat Kelurahan. Permasalahan gender, perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Faktor penyebab timbulnya sangat kompleks demikian pula dengan faktor –faktor penyembuhan juga harus kompleks.

Perlu bergandengan tangan dan saling mendukung antar OPD agar program/ kegiatan sinergis guna matangnya penuntasan permasalahan. Mengingat hal ini, ketercapaian target-target kinerja keluaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai secara umum memberikan sumbangan yang positif bagi capaian target program-program yang ada di renstra dengan tolak ukur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai yang lebih sempit. Namun, Berbicara dalam ranah yang lebih luas terkait kebermanfaatan program dalam jangka menengah terlebih lagi sampai dengan selesainya permasalahan seperti KDRT dan trafficking membutuhkan dukungan program lain yang pelaksanaannya ada pada lembaga/ OPD lain. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tantangan yang dihadapi, baik itu yang menyebabkan timbulnya permasalahan baru maupun tantangan penuntasan masalah yang sudah ada.

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

Kebijakan yang tetap diambil dalam mengatasi faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target capaian program/kegiatan yang direncanakan antara lain adalah:

- a. Mempercepat pengesahan APBD dan PAPBD.
- b. Meningkatkan kompetensi aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PM secara terus menerus.

- c. Menyeleksi kegiatan yang akan diusulkan sesuai dengan prioritas dan melakukan penajaman indikator target kinerja masing-masing program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja daerah.
- d. Meningkatkan koordinasi antar OPD (para Pemangku Jabatan), Stakeholder dan pengambil keputusan.
- e. Mengoptimalkan kegiatan publikasi dan sosialisasi serta kerjasama dengan masyarakat terkait kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.
- f. Mengoptimalkan kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PP, PA dan PM Kota Tanjungbalai

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai yang menunjukkan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran/ target renstra Pemberdayaan Masyarakat periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai.

a) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Kurangnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak
2. Belum meratanya pemahaman tentang KDRT dan Human trafficking
3. Masih kurang optimalnya koordinasi antar gugus tugas bidang Pemberdayaan perempuan
4. Masih rendahnya peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam

pengarusutamaan peran perempuan dan perlindungan anak

5. Belum optimalnya peran kader pemberdayaan perempuan dan perlindungan
6. Belum optimalnya perkembangan organisasi perempuan
7. Masih rendahnya peran/partisipasi anak dalam forum anak
8. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pola asuh anak berbasis agama untuk penyiapan generasi tangguh beriman dan bertaqwa
9. Masih tingginya angka kasus KDRT dan Trafficking
10. Masih rendahnya dukungan lintas sektor dalam Pengarusutamaan gender.

b) Pemberdayaan Masyarakat

1. Masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam membangun kemandirian kebersamaan, kepedulian untuk menangani permasalahan secara bersama-sama
2. Meningkatnya ketergantungan masyarakat pada bantuan dari Pemerintah
3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Kelurahan
4. Masih rendahnya inovasi TTG

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan akhir RKPD selain menguraikan tentang hasil RKPD tahun lalu juga harus memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan. Dalam hal penyusunan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan PM Kota Tanjungbalai Tahun 2024 yang tercantum dalam rancangan awal RKPD terdapat sedikit perbedaan dengan analisis kebutuhan. Perbedaan ini terletak pada pagu indikatif dengan kebutuhan yang telah ditetapkan yang biasanya dikarenakan keterbatasan anggaran, meskipun demikian hal ini diupayakan tidak mengganggu esensi secara substansi terhadap rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu perbedaan bisa saja terjadi akibat penyesuaian dengan kebijakan-kebijakan baru oleh Pemerintah Pusat dan atau oleh Pemerintah Provinsi yang mengharuskan sebuah program/kegiatan baru ditampung sementara pada saat rancangan awal disusun informasi belum diterima.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat secara teknis yang terkait dengan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan PM yaitu masukan tentang forum anak dan Kota Layak Anak yang sudah ditampung dalam Sub kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan PHA pada Lembaga Pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab / Kota dan Sub kegiatan Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak Tingkat daerah kabupaten / Kota.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan tidak lain adalah pernyataan-pernyataan untuk mencapai visi, misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Berdasarkan pernyataan misi diatas maka tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai adalah:

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan akuntabilitas Kinerja;
- b. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

3.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu tertentu serta harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 diukur dari indikator-indikator yang sekaligus menjadi sasaran strategis dari tujuan yang

telah ditetapkan. Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pelayanan publik , nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai;
- b. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak;
- c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan keluarga.

Selanjutnya Uraian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai berdasarkan tujuan beserta indikatornya tertuang pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

**TUJUAN, SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PP, PA DAN PM
KOTA TANJUNGBALAI**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PM	Meningkatnya pelayanan publik, nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PM	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pemerdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PM	A	A	A	A	A
2	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan	Meningkatnya Kualitas Hidup dan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	20%	20%	22%	22%	25%

	Perlindungan Anak	Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20 %	20 %	20 %	25%	25 %
			Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	100%	100%	100%	100%	100%
			Rasio KDRT (kasus)	10	8	7	7	7
			Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
			Ketersediaan data terpilah gender	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah forum anak yang terbentuk	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan keluarga	Cakupan Pembinaan LPM	60%	70%	80%	90%	100%
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%
			Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

			Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	30%	50%	70%	85%	90%
			Persentase pembinaan penciptaan alat teknologi tepat guna	30%	50%	70%	85%	90%
			Persentase pelaksanaan kegiatan jambore TTG	30%	50%	70%	85%	90%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2024 alokasi anggaran belanja langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai berjumlah **Rp. 2.930.063.636** terdiri dari 8 Program yang meliputi 19 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan.

Sementara dengan memperkirakan program dan kegiatan yang sama pada tahun 2025 berdasarkan keterbatasan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai memiliki prediksi anggaran sebesar **Rp. 2.303.342.760**.

Pada prinsipnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai pada tahun 2025 tidak berbeda dengan tahun 2024, program-program yang diperuntukkan bagi bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat masing-masing kegiatan akan memiliki kelompok sasaran yang berbeda-beda setiap tahun.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai untuk tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 di rangkum dalam tabel berikut :

**TABEL 4.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PP, PA DAN PM KOTA TANJUNGBALAI
UNTUK TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026**

Kode		Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		100%	2,740,562,587.00			100%	2,845,031,132.00
X	XX	01	2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi		100%	4,890,000		100%	6,000,000
X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	2,445,000	DAU	1 Dokumen	3,000,000
X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	2,445,000	DAU	1 Laporan	3,000,000
X	XX	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah		100%	1,902,789,287.00		100%	1,883,741,481.00
X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		15 orang/bulan	1,899,444,287.00	DAU	15 orang/bulan	1,880,741,481.00
X	XX	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	3,345,000	DAU	1 laporan	3,000,000
X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran		100%	256,212,400.00		100%	368,550,600.00
X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5 Paket	1,780,000	DAU	5 Paket	3,000,000
X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		15 Paket	33,649,000	DAU	15 Paket	45,268,000
X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		11 Paket	7,764,000	DAU	11 Paket	8,176,200
X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		513 paket	46,577,000	DAU	513 paket	56,186,400
X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5 Paket	52,912,400	DAU	5 Paket	27,500,000
X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	2,520,000	DAU	1 Dokumen	2,400,000
X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30 Laporan	111,010,000	DAU	30 Laporan	226,020,000
X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	414,070,900		100%	417,463,051
X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		500 Laporan	4,000,000	DAU	600 Laporan	6,000,000
X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	63,172,400	DAU	36 Laporan	23,199,063
X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	346,898,500	DAU	12 Laporan	388,263,988
X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	162,600,000		100%	169,276,000
X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit	146,040,000	DAU	10 Unit	149,286,000
X	XX	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit	16,560,000	DAU	4 Unit	19,990,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	20%	87,159,250			20%	200,000,000
				Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20%				20%	
				Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	100%				100%	
2	08	02	2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang melaksanakan ARG	100%	47,868,000			100%	100,000,000
2	08	02	2.01 0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	68 Orang	29,965,000	DAU		68 Orang	50,000,000
2	08	02	2.01 0008 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	40 Orang	17,903,000	DAU		40 Orang	50,000,000
2	08	02	2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang duduk di DPRD	100%	39,291,250			100%	100,000,000
2	08	02	2.02 0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	39,291,250	DAU		1 Dokumen	100,000,000
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT	10	239,033,000			10	400,000,000
				Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100%				100%	
2	08	03	2.01 Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilingkup daerah kabupaten/kota	Persentase masyarakat yang mengikuti pendampingan	100%	67,480,000			100%	200,000,000
2	08	03	2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	51,980,000	DAK		1 Dokumen	100,000,000
2	08	03	2.01 0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab / Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	15,500,000	DAU		34 Perangkat Daerah	100,000,000
2	08	03	2.02 Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Persentase kasus yang tertangani	100%	171,553,000			100%	200,000,000
2	08	03	2.02 0001 Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	17 Orang	51,220,000	DAU		17 Orang	50,000,000
2	08	03	2.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 layanan	120,333,000	DAK		21 layanan	150,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			100%	23,983,400			100%	40,000,000
2	08	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang mendapat pembinaan	100%	23,983,400			100%	40,000,000
2	08	04	2.01	0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	23,983,400	DAU		1 Dokumen	40,000,000
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Ketersediaan data terpilah gender	100%	28,080,000			100%	50,000,000
2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki data gender dan anak	100%	28,080,000			100%	50,000,000
2	08	05	2.01	0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	28,080,000	DAU		1 Dokumen	50,000,000
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Jumlah forum anak yang terbentuk	100%	164,661,250			100%	200,000,000
					Jumlah sarana dan prasarana ramah anak	85%				85%	
					Jumlah DEKELA dan KELANA	1 Kelurahan				1 Kelurahan	
2	08	06	2.01	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi ramah anak	100%	103,790,000			100%	100,000,000
2	08	06	2.01	0001 Advokasi kebijakan dan pendampingan PHA pada Lembaga Pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab / Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 Organisasi	103,790,000	DAU		4 Organisasi	100,000,000
2	08	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD dan lembaga dalam peningkatan kualitas hidup anak	100%	60,871,250			100%	100,000,000
2	08	06	2.02	0003 Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak Tingkat daerah kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60,871,250	DAU		1 Dokumen	100,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		100%	444,315,000		100%	500,000,000
2	08	07	2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		100%	79,140,000		100%	100,000,000
2	08	07	2.01 0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	79,140,000	DAU	1 Dokumen	100,000,000
2	08	07	2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	230,310,000		100%	200,000,000
2	08	07	2.02 0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		10 Orang	62,670,000	DAU	10 Orang	100,000,000
2	08	07	2.02 0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		5 layanan	167,640,000	DAU	5 layanan	100,000,000
2	08	07	2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	134,865,000		100%	200,000,000
2	08	07	2.03 0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/		10 Orang	88,265,000	DAU	10 Orang	100,000,000
2	08	07	2.03 0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota		1 Dokumen	46,600,000	DAU	1 Dokumen	100,000,000
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pembinaan LPM	100%	474,992,560.00		100%	530,000,000
				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100%			100%	
				Persentase PKK aktif	100%			100%	
				Persentase posyandu aktif	100%			100%	
				Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	100%			100%	
				Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	50%			70%	
				Persentase pembinaan penciptaan alat teknologi tepat guna	50%			70%	
				Persentase pelaksanaan kegiatan jambore TTG	50%			70%	
2	13	05	2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat	100%	474,992,560		100%	530,000,000
2	13	05	2.01 0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	187,259,200	DAU	1 Dokumen	200,000,000
2	13	05	2.01 0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	38,040,000	DAU	1 Unit	20,000,000
2	13	05	2.01 0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	9,852,000	DAU	1 Dokumen	10,000,000
2	13	05	2.01 0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	239,841,360	DAU	1 Dokumen	300,000,000
						4,202,787,047.00			4,765,031,132.00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai pada dasarnya merupakan Dokumen perencanaan teknis Operasional tahunan memuat rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 yang tetap memprioritaskan pada pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja daerah. Untuk itu pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai tetap menggiatkan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan bidang Pemberdayaan Masyarakat serta berupaya untuk melakukan peningkatan kinerja dengan didukung penyediaan SDM aparatur yang profesional dan kredibel serta sarana dan prasarana yang memadai.

Rencana Kerja Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan PM Kota Tanjungbalai Tahun 2025 ini disahkan dengan Keputusan Walikota yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan PM dan merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan PM yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan arah kebijakan, strategi, hingga penentuan plafon Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Selain itu Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai ini disusun untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai sebagaimana yang tertuang di dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai yang substansinya telah disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2021-2026 sehingga terciptanya perencanaan yang sinergi dan selaras pada masing-masing OPD

umumnya serta pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai khususnya.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai Tahun 2025 disusun untuk dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai sasaran target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan dan Anggaran DP3A & PMK
Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2023

No	KODE REKENING				NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DANA	SUMBER DANA	BELANJA		REALISASI		Sisa Dana	REALISASI FISIK (%)
								OPERASI	MODAL	OPERASI (Rp)	MODAL (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10 = (4 - 8 - 9)	11 = (8+9)/4
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	2	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1.	2	08	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,421,373,655			-	2,391,850,400			98.78%
	2	08	01	2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	5,280,000				5,280,000			100.00%
	2	08	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,640,000	DAU	2,640,000	-	2,640,000	-	-	100%
	2	08	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,640,000	DAU	2,640,000	-	2,640,000	-	-	100%
	2	08	01	2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1,742,568,387				1,721,335,730			99%
	2	08	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,737,568,387	DAU	1,737,568,387	-	1,716,335,730		21,232,657	98.78%
	2	08	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,000,000	DAU	5,000,000	-	5,000,000	-	-	100%
	2	08	01	2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	289,074,500				288,490,162			100%
	2	08	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,999,400	DAU	2,999,400	-	2,999,350	-	50	100%
	2	08	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,000,000	DAU	17,000,000	-	17,000,000	-	-	100%
	2	08	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,100,000	DAU	5,100,000	-	5,096,000	-	4,000	100%
	2	08	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17,010,000	DAU	17,010,000	-	17,010,000	-	-	100%
	2	08	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45,017,100	DAU	45,017,100	-	44,437,100	-	580,000	99%
	2	08	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,000,000	DAU	2,000,000	-	2,000,000	-	-	100%
	2	08	01	2.06	09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	199,948,000	DAU	199,948,000	-	199,947,712	-	288	100%
	2	08	01	2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	25,300,000				23,700,000			94%
	2	08	01	2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,300,000	DAU		25,300,000	-	23,700,000	1,600,000	94%

	2	08	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275,200,768			269,101,108			98%
	2	08	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	DAU	4,000,000	-	4,000,000	-	100%
	2	08	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,400,768	DAU	20,400,768	-	14,301,108	6,099,660	70%
	2	08	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	250,800,000	DAU	250,800,000	-	250,800,000	-	100%
	2	08	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83,950,000			83,943,400			100%
	2	08	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73,890,000	DAU	73,890,000	-	73,883,400	6,600	100%
	2	08	01	2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,060,000	DAU	10,060,000	-	10,060,000	-	100%
2.	2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	132,283,200			132,282,501			100%
	2	08	02	2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	75,759,000			75,759,000			100%
	2	08	02	2.01	03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	31,867,000	DAU	31,867,000	-	31,867,000	-	100%
	2	08	02	2.01	04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	43,892,000	DAU	43,892,000	-	43,892,000	-	100%
	2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan	56,524,200			56,523,501			100%
	2	08	02	2.01	03 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	56,524,200	DAU	56,524,200	-	56,523,501	699	100%
3.	2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	745,345,000			616,462,000			83%
	2	08	03	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	58,670,000			58,617,000			100%
	2	08	03	2.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota (DAK NON FISIK)	46,670,000	DAK	46,670,000	-	46,670,000	-	100%
	2	08	03	2.01	02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab / Kota	12,000,000	DAU	12,000,000	-	11,947,000	53,000	100%
	2	08	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	174,773,000			96,643,000			55%
	2	08	03	2.02	01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	56,000,000	DAU	56,000,000	-	55,965,000	35,000	100%
	2	08	03	2.02	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota (DAK NON FISIK)	118,773,000	DAU	118,773,000	-	40,678,000	78,095,000	34%
	2	08	03	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	511,902,000			461,202,000			90%
	2	08	03	2.03	02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK NON FISIK)	31,902,000	DAK	31,902,000	-	31,202,000	700,000	0%
	2	08	03	2.03	04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	480,000,000	DAU	480,000,000	-	430,000,000	50,000,000	90%

4.	2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	63,268,000				63,268,000			100%
	2	08	04	2.01	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	63,268,000				63,268,000			100%
	2	08	04	2.01	03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	63,268,000	DAU	63,268,000	-	63,268,000	-	-	100%
5.	2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	10,521,000				10,521,000			100%
	2	08	05	2.01	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tinngkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	10,521,000				10,521,000			100%
	2	08	05	2.01	01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	10,521,000	DAU	10,521,000	-	10,521,000	-	-	100%
6.	2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	270,146,400				268,896,100			100%
	2	08	06	2.01	<i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	203,125,600				202,125,300			100%
	2	08	06	2.01	01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	203,125,600	DAU	203,125,600		202,125,300		1,000,300	100%
	2	08	06	2.02	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	67,020,800				66,770,800			100%
	2	08	06	2.02	03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67,020,800	DAU	66,120,800	900,000	65,870,800	900,000	250,000	100%

7.	2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	267,015,000				124,448,000			47%
	2	08	07	2.01	<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	63,030,000				62,380,000			99%
	2	08	07	2.01	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK NON FISIK)	63,030,000	DAK	63,030,000	-	62,380,000	-	650,000	99%
	2	08	07	2.02	<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	161,291,000				30,074,000			19%
	2	08	07	2.02	01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25,560,000	DAU	25,560,000	-	25,559,000	-	1,000	100%
	2	08	07	2.02	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK NON FISIK)	135,731,000	DAK	135,731,000	-	4,515,000	-	131,216,000	3%
	2	08	07	2.03	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	42,694,000				31,994,000			75%
	2	08	07	2.03	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (DAK NON FISIK)	42,694,000	DAK	42,694,000	-	31,994,000	-	10,700,000	75%
	2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
8.	2	13	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	933,632,040				929,054,414			100%
	2	13	05	2.01	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	933,632,040				929,054,414			100%
	2	13	05	2.01	02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	517,482,000	DAU	517,482,000	-	517,482,000	-	-	100%
	2	13	05	2.01	03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	82,678,500	DAU	82,678,500	-	82,678,500	-	-	100%
	2	13	05	2.01	04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	66,720,000	DAU	66,720,000	-	65,760,000	-	960,000	99%
	2	13	05	2.01	05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	8,520,000	DAU	8,520,000	-	8,520,000	-	-	100%
	2	13	05	2.01	06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	11,560,000	DAU	11,560,000	-	11,560,000	-	-	100%
	2	13	05	2.01	09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	246,671,540	DAU	225,671,540	21,000,000	222,153,914	20,900,000	3,617,626	99%
JUMLAH						4,843,584,295		4,796,384,295	47,200,000	4,536,782,415		306,801,880	93.67%

Tabel 2.2

Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK Kota Tanjungbalai

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA		%	ANGGARAN		%
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2,640,000	2,640,000	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%	2,640,000	2,640,000	100%
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	5,000,000	5,000,000	100%
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 paket	3 paket	100%	2,999,400	2,999,350	100%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Paket	15 Paket	100%	17,000,000	17,000,000	100%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23 paket	23 paket	100%	5,100,000	5,096,000	100%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	513 Paket	513 Paket	100%	17,010,000	17,010,000	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Paket	7 Paket	100%	45,017,100	44,437,100	99%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2,000,000	2,000,000	100%
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan	100%	199,948,000	199,947,712	100%
		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>						
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 unit	4 unit	100%	25,300,000	23,700,000	94%
		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>						
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	400 Laporan	100%	4,000,000	4,000,000	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100%	20,400,768	14,301,108	70%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14 Laporan	14 Laporan	100%	250,800,000	250,800,000	100%
		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	3 Unit	100%	73,890,000	73,883,400	100%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit	100%	10,060,000	10,060,000	100%

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
<i>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	100%	31,867,000	31,867,000	100%
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	100%	43,892,000	43,892,000	100%
<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	56,524,200	56,523,501	100%
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>						
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota (DAK NON FISIK)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	46,670,000	46,670,000	100%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab / Kota	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	100%	12,000,000	11,947,000	100%
<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	17 Orang	100%	56,000,000	55,965,000	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota (DAK NON FISIK)	21 Layanan	8 Layanan	38%	118,773,000	40,678,000	34%
<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK NON FISIK)	20 Orang	20 Orang	100%	31,902,000	31,202,000	98%
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	480,000,000	430,000,000	90%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						
<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	63,268,000	63,268,000	100%

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						
<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	10,521,000	10,521,000	100%
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						
<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Organisasi	4 Organisasi	100%	203,125,600	202,125,300	100%
<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	67,020,800	66,770,800	100%
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>						
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK NON FISIK)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	63,030,000	62,380,000	99%
<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	100%	25,560,000	25,559,000	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK NON FISIK)	5 layanan	1 layanan	20%	135,731,000	4,515,000	3%
<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (DAK NON FISIK)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	42,694,000	31,994,000	75%

2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
		<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>						
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	517,482,000	517,482,000	100%
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	82,678,500	82,678,500	100%
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	31 Unit	31 Unit	100%	66,720,000	65,760,000	99%
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	8,520,000	8,520,000	100%
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	100%	11,560,000	11,560,000	100%
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	246,671,540	243,053,914	99%
		JUMLAH				3,106,015,908	2,820,446,685	90.81%

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				20%	20%	22%	22%	25%	20%	20%	49.5%			20%	20%	49.5%		
2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD				20%	20%	20%	25%	25%	20%	20%	20%			20%	20%	20%		
3.	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG				100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%			-	100%	100%		
4.	Rasio KDRT				10	8	7	7	7	10	85	100%			10	85	100%		
5.	Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%		
6.	Ketersediaan data terpilah gender				100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%			-	100%	100%		
7.	Jumlah forum anak yang terbentuk				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%		
8.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%		
9.	Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif				100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%			-	100%	100%		
10.	Cakupan Pembinaan LPM				60%	70%	80%	90%	100%	-	100%	100%			-	100%	100%		
11.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%		
12.	Persentase PKK aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%		
13.	Persentase posyandu aktif				100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%			-	100%	100%		
14.	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%			-	100%	100%		
15.	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat				30%	50%	70%	85%	95%	-	0%	30%			-	0%	30%		
16.	Persentase pembinaan penciptaan alat teknologi tepat guna				30%	50%	70%	85%	90%	-	30%	30%			-	30%	30%		

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK Kota Tanjungbalai

Rancangan Akhir RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan										
Kode		Program dan Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Out Come), Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu (Rp)	Kode		Program dan Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Out Come), Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu (Rp)		
(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)	(11)	(12)	(13)		
X URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							X URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100%	2.886,646,464	X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100%	2.886,646,464		
X	XX	01	2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	5.110,000	X	XX	01	2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	5.110,000		
X	XX	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanjungbalai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.555,000	X	XX	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanjungbalai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.555,000
X	XX	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tanjungbalai	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.555,000	X	XX	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tanjungbalai	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.555,000
X	XX	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	1.885,741,581,00	X	XX	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	1.885,741,581		
X	XX	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanjungbalai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	1.880,741,481	X	XX	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanjungbalai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	1.880,741,481
X	XX	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tanjungbalai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5,000,100	X	XX	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tanjungbalai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5,000,100
X	XX	01	2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100%	22,500,000	X	XX	01	2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100%	22,500,000		
X	XX	01	2.03	02 Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tanjungbalai	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30 paket	22,500,000	X	XX	01	2.03	02 Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tanjungbalai	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30 paket	22,500,000
X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pemerintahan	100%	356,954,900,000	X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pemerintahan	100%	356,954,900		
X	XX	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tanjungbalai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2,040,000	X	XX	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tanjungbalai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2,040,000
X	XX	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjungbalai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	45,388,000	X	XX	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjungbalai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	45,388,000
X	XX	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanjungbalai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket	8,010,700	X	XX	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanjungbalai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket	8,010,700
X	XX	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanjungbalai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	49,396,400	X	XX	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tanjungbalai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	513 paket	49,936,400	
X	XX	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tanjungbalai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	24,099,800	X	XX	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tanjungbalai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	24,099,800
X	XX	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tanjungbalai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2,000,000	X	XX	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tanjungbalai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2,000,000
X	XX	01	2.06	09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tanjungbalai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	80 Laporan	226,020,000	X	XX	01	2.06	09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tanjungbalai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	80 Laporan	226,020,000
X	XX	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	114,625,400	X	XX	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	114,625,400		
X	XX	01	2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanjungbalai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	114,625,400	X	XX	01	2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanjungbalai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	114,625,400
X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	383,508,583	X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	383,508,583		
X	XX	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjungbalai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	5,000,000	X	XX	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjungbalai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	5,000,000
X	XX	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjungbalai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	23,199,063	X	XX	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjungbalai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	23,199,063
X	XX	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanjungbalai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	355,309,520	X	XX	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanjungbalai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	355,309,520
X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	118,206,000	X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	118,206,000		
X	XX	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanjungbalai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	98,216,000	X	XX	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanjungbalai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	98,216,000
X	XX	01	2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanjungbalai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	19,990,000	X	XX	01	2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanjungbalai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	19,990,000

Kode	Program dan Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Out Come), Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu (Rp)	Kode	Program dan Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Out Come), Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu (Rp)
(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	20%	97,152,000	2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	20%	97,152,000
				Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20%						Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20%	
				Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	100%						Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	100%	
2 08 02 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			Persentase OPD yang melaksanakan ARG	100%	75,606,000	2 08 02 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			Persentase OPD yang melaksanakan ARG	100%	75,606,000
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Tanjungsibulai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	50,175,000	2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Tanjungsibulai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	50,175,000
2 08 02 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Tanjungsibulai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	25,431,000	2 08 02 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Tanjungsibulai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	25,431,000
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			cakupan lembaga masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan	100%	21,546,000	2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			cakupan lembaga masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan	100%	21,546,000
2 08 01 2.03 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Tanjungsibulai	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	21,546,000	2 08 01 2.03 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Tanjungsibulai	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	21,546,000
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			Rasio KDRT	10	409,194,500	2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			Rasio KDRT	10	409,194,500
				Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100%						Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100%	
2 08 03 2.01	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilengkap daerah kabupaten/kota			Persentase masyarakat yang mengikuti pendampingan	100%	18,939,000	2 08 03 2.01	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilengkap daerah kabupaten/kota			Persentase masyarakat yang mengikuti pendampingan	100%	18,939,000
2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab / Kota		Tanjungsibulai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	18,939,000	2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab / Kota		Tanjungsibulai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	18,939,000
2 08 03 2.02	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota			Persentase kasus yang tertangani	100%	51,057,500	2 08 03 2.02	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota			Persentase kasus yang tertangani	100%	51,057,500
2 08 03 2.02 01	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota		Tanjungsibulai	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	17 Orang	51,057,500	2 08 03 2.02 01	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota		Tanjungsibulai	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	17 Orang	51,057,500
2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Persentase lembaga penyedia layanan	100%	339,198,000	2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Persentase lembaga penyedia layanan	100%	339,198,000
2 08 03 2.03 03	Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota		Tanjungsibulai	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5 Orang	39,198,000	2 08 03 2.03 03	Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota		Tanjungsibulai	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5 Orang	39,198,000
2 08 03 2.03 04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota		Tanjungsibulai	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	300,000,000	2 08 03 2.03 04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota		Tanjungsibulai	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	300,000,000
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif	100%	32,949,000	2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif	100%	32,949,000
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Persentase keluarga yang mendapat pembinaan	100%	32,949,000	2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Persentase keluarga yang mendapat pembinaan	100%	32,949,000
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Tanjungsibulai	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	32,949,000	2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Tanjungsibulai	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	32,949,000
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			Ketersediaan data terpilah gender	100%	27,990,000	2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			Ketersediaan data terpilah gender	100%	27,990,000
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki data gender dan anak	100%	27,990,000	2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki data gender dan anak	100%	27,990,000

Kode				Program dan Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Out Come), Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu (Rp)	Kode				Program dan Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Out Come), Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu (Rp)
(2)				(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)		(10)	(11)	(12)	(13)
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tanjungsibulai	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	27,990,000	2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tanjungsibulai	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	27,990,000
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				Jumlah forum anak yang terbentuk	100%	199,709,500	2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				Jumlah forum anak yang terbentuk	100%	199,709,500
							Jumlah sarana dan prasarana ramah anak	85%									Jumlah sarana dan prasarana ramah anak	85%	
							Jumlah DEKELA dan KELANA	1 Kelurahan									Jumlah DEKELA dan KELANA	1 Kelurahan	
2	08	06	2.01		Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase fasilitasi ramah anak	100%	148,814,500	2	08	06	2.01		Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase fasilitasi ramah anak	100%	148,814,500
2	08	06	2.01	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan PHA pada Lembaga Pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab / Kota	Tanjungsibulai	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 Organisasi	148,814,500	2	08	06	2.01	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan PHA pada Lembaga Pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab / Kota	Tanjungsibulai	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 Organisasi	148,814,500
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase OPD dan lembaga dalam peningkatan kualitas hidup anak	100%	50,895,000	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase OPD dan lembaga dalam peningkatan kualitas hidup anak	100%	50,895,000
2	08	06	2.02	03	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten / Kota	Tanjungsibulai	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,895,000	2	08	06	2.02	03	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten / Kota	Tanjungsibulai	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,895,000
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100%	68,102,000	2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100%	68,102,000
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	18,766,000	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	18,766,000
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tanjungsibulai	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	18,766,000	2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tanjungsibulai	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	18,766,000
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase lembaga penyedia layanan	100%	49,336,000	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase lembaga penyedia layanan	100%	49,336,000
2	08	07	2.03	07	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Tanjungsibulai	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	49,336,000	2	08	07	2.03	07	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Tanjungsibulai	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	49,336,000

Kode		Program dan Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Out Come), Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu (Rp)	Kode		Program dan Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Out Come), Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu (Rp)				
(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)	(11)	(12)	(13)				
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			Cakupan Pembinaan LPM	100%	1,199,452,060.00	2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			Cakupan Pembinaan LPM	100%	1,199,452,060		
					Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100%								Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100%				
					Persentase PKK aktif	100%								Persentase PKK aktif	100%				
					Persentase penyandu aktif	100%								Persentase penyandu aktif	100%				
					Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	100%								Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	100%				
					Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	50%								Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	50%				
					Persentase pembinaan penciptaan alat teknologi tepat guna	50%								Persentase pembinaan penciptaan alat teknologi tepat guna	50%				
					Persentase pelaksanaan kegiatan jambore TTG	50%								Persentase pelaksanaan kegiatan jambore TTG	50%				
2	13	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaksana Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat	100%	1,199,452,060	2	13	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaksana Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat	100%	1,199,452,060				
2	13	05	2.01	02	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tanjungbali	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Dokumen	544,168,850	2	13	05	2.01	02	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tanjungbali	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Dokumen	544,168,850
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Tanjungbali	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	125,887,200	2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Tanjungbali	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	125,887,200
2	13	05	2.01	04	Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tanjungbali	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	31 Unit	82,280,400	2	13	05	2.01	04	Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tanjungbali	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	31 Unit	82,280,400
2	13	05	2.01	05	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Tanjungbali	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	10,180,000	2	13	05	2.01	05	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Tanjungbali	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	10,180,000
2	13	05	2.01	09	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Tanjungbali	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	436,935,610	2	13	05	2.01	09	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Tanjungbali	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	436,935,610
							4,921,195,524								4,921,195,524				